

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan selama ini serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diatur pada satu paket undang-undang yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah, serta UU No.33 tahun 2004 yang membahas tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, juga menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (performance budget). Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah berlakunya UU.No. 22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 amandemen yang pertama dilakukan selaku langkah reformasi keuangan dengan cara merubah sistem penganggaran. Perubahan sistem pelanggaran ini meliputi perubahan terhadap proses struktur anggaran serta penganggaran. Perubahan proses ini terkait dilakukannya perubahan proses penyusunan anggaran yang dahulunya bersifat sentralisasi dirubah menjadi lebih partisipatif. Apabila pada program sebelumnya pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, maka dengan otonomi yang luas dan nyata, diberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Struktur anggaran diganti dari kerangka (struktur) anggaran tradisional dengan pendekatan berimbang menjadi struktur anggaran baru dengan anggaran berbasis kinerja. Dilakukannya Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada pencapaian hasil dari program yang dibiayai dengan APBD dihubungkan dengan target kinerja terukur (Mahmudi,2009).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, pemerintah memerlukan rancangan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Komposisi belanja dan penyerapan anggaran tersebut merupakan perimbangan dan penyesuaian upaya secara rasional yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) se tempat dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan publik.

Masing-masing anggaran dihubungkan dengan kinerja yang hendak diraih, yang mana terdapat parameter yang jelas dalam mengukur keberhasilan suatu anggaran. Jika ditemukannya sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran ini tetap dapat dipakai untuk pemakaian sumber pembiayaan tahun anggaran selanjutnya yang masuk ke dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA).

Kinerja merupakan bentuk dari kerja baik secara kualitas dan juga kuantitas yang diperoleh seseorang dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). Dalam melakukan setiap pekerjaan, hasilnya harus diukur dengan kinerja karyawan, badan ataupun perusahaan tersebut agar dapat dievaluasi dan diperbaiki untuk kedepannya.

Penganggaran berbasis kinerja memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan dapat diandalkan, dengan sumber daya manusia yang kurang dapat menyebabkan turunnya target maupun pendapatan yang hendak dicapai oleh pemerintah yang

menyebabkan kinerja pemerintah akan dinilai tidak baik, dan apabila tingginya belanja daerah maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil.

Munawar (2006) mengatakan evaluasi merupakan penilaian yang ditujukan kepada anggaran yang sudah disusun dan cara agar mengetahui berapa banyak penyimpangan yang telah terjadi terus ditelusuri hingga para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

Evaluasi anggaran penting dilakukan untuk mengetahui perbandingan terhadap hasil evaluasi serta tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang diatur dan disusun oleh pemerintah. Hasil evaluasi bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai alokasi anggaran, perimbangan anggaran, dan berbagai pengawasan terhadap bantuan yang ditujukan kepada pemerintah. Metode yang dapat dilakukan dalam menganalisis kinerja merupakan analisis rasio keuangan.

Dengan melakukan analisis rasio keuangan dilakukannya cara untuk melihat kinerja dan teknik yang dapat mengungkapkan hubungan yang penting, menjadi perbandingan dasar dalam proses menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk ditemukan hanya dengan mempelajari masing-masing variabel pembentuk rasio (Wild, Subramanyan, Hasley, 2004).

Hal ini sangat diperhatikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada agar pendapatan daerah kota Padang tetap meningkat.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka penulis berminat untuk menulis dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2016 -2019.** ”

## 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melalui penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diluar dari perhitungan rasio keuangan tiga tahun belakangan (2017-2019).

## 1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melalui penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang berdasarkan rasio keuangan.

## 1.4. Manfaat Penulisan

### 1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah wawasan dan sebagai sarana penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya.
- b. Dapat mengetahui tentang cara cara, system, dan teknologi yang digunakan didalam dunia kerja.
- c. Dapat memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas akhir.

### 2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

- a. Membantu kegiatan dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab Bapenda.
- b. Menjalin hubungan baik antara Bapenda dengan Universitas.

## 1.5. Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih setelah disesuaikan dengan latar belakang juga rumusan masalah yang akan dibahas merupakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, yang dipilih tempat untuk menjalankan kuliah kerja lapangan/magang selama 40 hari kerja.

## 1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Berisi Latar Belakang yang mencakup Rumusan Masalah, Tujuan dan juga Manfaat Magang serta Sistematika Penulisan Laporan Magang.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka atau segala hal yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini.

BAB III: Gambaran Umum dan Profil Lembaga

Berisi gambaran umum badan yang terdiri dari sejarah dan perkembangan badan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi badan.

BAB IV: Pembahasan

Berisikan hasil studi lapangan selama di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) yang menyangkut tentang analisa dari rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V: Penutup

Kesimpulan serta saran dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis.

